

Mendamba Menteri Berjawa Entrepreneur

INI kali pertama dalam sejarah Indonesia, presiden dan wakil presiden sama-sama berlatar belakang pengusaha. Presiden Jokowi adalah pengusaha furnitur di Solo dengan pangsa pasar lokal dan global (ekspor). Wapres Jusuf Kalla pun sudah lama terkenal sebagai suadagar besar dari Kota Makassar. Dalam konteks homogen, kepemimpinan ala pengusaha tentu akan membawa warna tersendiri bagi karakter birokrasi dan pemerintahan RI ke depan.

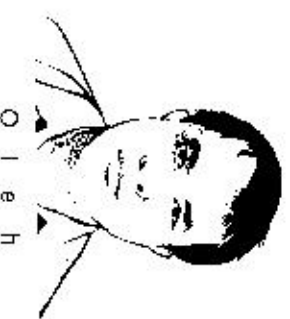
Karena itu, para menteri di kabinet Jokowi-JK diharapkan mampu menyalurkan diri dengan karakter/ gaya kepemimpinan bisnisnya. Semakin banyak menteri berjawa *entrepreneur*, semakin cepat pula kemajuan bisa diraih. Bahkan jika telah menetapkan hal itu selama bertahun-tahun, yaitu MINA, *city's strategy, mental leadership* bahkan yang berarti belakang CEO *Java Post Group* justru lebih pas dalam mengutus BUMN. Dahulu tidak menerapkan politik kekuasaan dalam membawa BUMN ke ranah *private business and transaction*. Jadi, selain dituntut dinamis, para menteri di kabinet Jokowi-JK wajib mengelola keahlian keterampilan ulangan bijak (*manage money wisely*) seperti halnya menata ulang perusahaan. Penggunaan uang negara sekecil apa pun harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai pengusaha, Jokowi-JK tentu tidak ingin para menternya

menggunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak penting. *Cash flow* Kementerian dibutuhkan *the life blood* negara yang tidak boleh korosi atau tersedot oleh perilaku menteri yang menyimpang.

Kali, publik sangat berharap karakter bisnis Jokowi-JK berdampak besar terhadap pola pikir para menteri dalam mengelola pemerintahan. Anggaran tidak sekadar tersepat-layan program/proyek Kementerian, tetapi harus dipakai secara hati-hati, tepat sasaran, hemat, serta produktif. Bagi pemimpin burokrasi pengusaha, korupsi serius merupakan suatu bisa dianggapi merupakan korupsi dan masuk dalam pembanguan dan melancarkan hasil pembangunan yang berkualitas rendah, bahkan terburuknya.

Presiden Wapres yang berlatar *entrepreneur* tentu memberikan perlakuan khusus yang merupakan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan bagi diri dan kelompoknya. Karena itu, pemerintah memberi karena perilaku kerja yang menyimpang tidak wajar harus dipandang sebagai langkah yang lazim dilakukan presiden. Kita berharap tidak ada lagi proyek pemerintahan yang dipaksakan hanya untuk menghasilkan anggaran.

Yang lebih penting, para menteri diharapkan tidak lagi sembarangan dalam memilih peminat/pemilih proyek pemerintah. Peminat/pemilih



AGUS STINTUS SIMANUNTAK*

der semestinya telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik, berkumitan tinggi terhadap kepentingan nasional, serta berpengalaman dalam menghasilkan produk barang/jasa yang terbaik. Masih banyak pengisahan berintegritas tinggi di negeri ini yang bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan proyek pemerintahan. Mereka umumnya membangun bisnis berdasar kejujuran dan kerja keras.

Ironisnya, pengusaha yang berintegritas justru sering dihadapkan pada urusan burokrasi yang rumit dan korup. Korupsi telah merusak moral ekonomi bangsa, membunuh budaya malas bekerja dan berpikir kreatif serta melambatkan daya kreativitas yang baik di masyarakat. Mental burokrasi semacam inilah yang perlu direvolusi kabinet Jokowi-JK. Sebagaimana dinyatakan Jokowi dalam visi ekonominya, peningkatan dan perbaikan etos kerja

menjadi aspek yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Mengutip pernyataan Jokowi, "Kita memiliki kekayaan yang sangat alih bisa. Tetapi, kita kebalut di banyak budaya kerja, etos kerja, karena menyangkut tidak disiplin sejak awal. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia adalah yang utama kita lakukan selama lima tahun ke depan." Itu berarti sumber daya manusia (SDM) burokrasi serta bisnis berintegritas tinggi menjadi penentu dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkualitas.

Pada tingkat ekonomi alias *ekonomikus* (Yunani) itu bermakna pengetahuan, rumah atau tempat tinggal yang tidak hanya berwujud soal materi akan angka pertumbuhan, tetapi juga menyuguhkan aspek spiritual dan moralitas manusia. *Okonomikos* terkait erat dengan kebudayaan tertinggi manusia, yaitu kebutuhan, etika, dan budaya.

Karena itu, para menteri di kabinet Jokowi-JK diharapkan tidak hanya memiliki jiwa *marketing* dalam mempromosikan ragam produk dalam negeri tetapi juga peduli terhadap persoalan etos serta kebudayaan di masyarakat. Seperti halnya spirit *entrepreneur* yang menyatakan *it's all about the customer*, seluruh menteri Jokowi-JK wajib berkomitmen tinggi kepada rakyat dengan berkata *it's all about my people*.

Artinya, para menteri wajib mengenal siapa rakyat yang dilayaninya (*know your people*). Selain itu, menteri tidak hanya mahir membuat keputusan yang cepat dan tepat, tetapi juga mampu memotivasi serta menginspirasi rakyat untuk berkarya. Dalam proses inilah para menteri memiliki kedudukan yang strategis dalam memberikan teladan moral dan pemikiran kepada masyarakat.

Saatnya kabinet Jokowi-JK menggilirkan "bola salju" kejayaan dan keadilan dari atas ke bawah hingga berdampak luas ke seluruh aparatur pemerintahan. Bahkan, lewat arah dan kebijakan menteri, cara berpikir masyarakat bisa dikoreksi.

Sebab, menurut Deming's *fisher only rule leader can transform our society*. Namun, tugas berat kabinet Jokowi-JK ke depan butuh peran mitra kerja, yakni DPR, dalam rangka *check and balances*. Dewan perlu mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif serta transparan sekaligus memastikan terwujudnya hak-hak rakyat. DPR sebagai "dewan komitans" yang bertugas mengawasi dan menasihati presiden dan serta mentrinya supaya pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat (*stakeholder utama*).

*) Dosen Program Manajemen Bisnis FI, Universitas Kristen Petra Surabaya (angusm@petra.ac.id)

Pembaca Menulis

